



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

**RENCANA KERJA PERUBAHAN**

***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN  
STATISTIK***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, maka Perubahan Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2023 dapat diselesaikan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk wajib menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Perubahan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024 ini tidak terlepas dengan kendala-kendala teknis yang dihadapi, namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut dengan langkah-langkah antisipatif melalui koordinasi dengan instansi dan pihak terkait. Mudah-mudahan RENJA ini dapat memberikan informasi untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 08 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Denpasar



Dr. Mda Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, MSi

Pembina TK. I

NIP. 197801281996121003



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan II.....	7
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	38
<b>BAB IV PENUTUP</b>	



## **DAFTAR TABEL**

2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	8
2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	24
3.1. Perubahan Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.....	31



## **BAB I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **1.1. Latar Belakang**

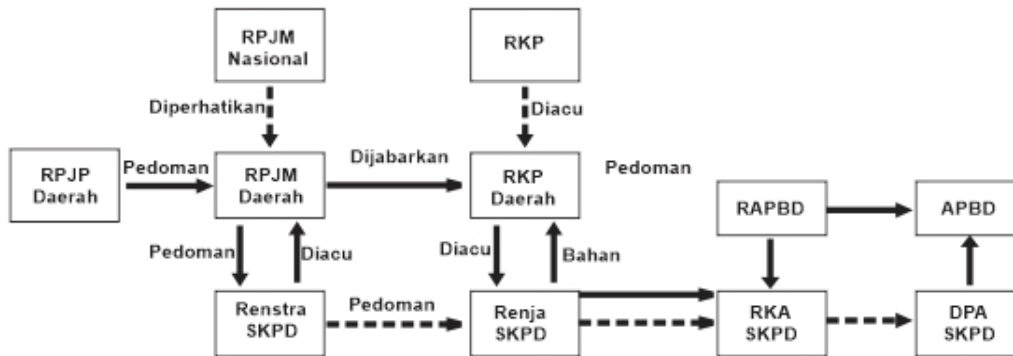
Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Pusat dan Daerah diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai rencana kerja tahunan. Undang- undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Perubahan Renja OPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) OPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD).

Sebagai tindak lanjutnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Renstra-Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD serta mengacu pada hasil Musrenbang.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, dan penambahan kegiatan baru. Perubahan Renja didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II. Di dalam perubahan Renja Perangkat Daerah juga memuat permasalahan-permasalahan yang belum dapat diselesaikan dan memuat program-program sebagai penjabaran Renstra Perangkat Daerah. Dengan adanya Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dapat lebih menjamin konsistensi perencanaan dan juga sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan secara berkesinambungan dan sinergi dengan program-program Perangkat Daerah lainnya.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai Perangkat Daerah Kota Denpasar juga diwajibkan menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024. Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.





## 1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



9. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016), tambahan lembaran daerah Kota Denpasar Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali : (5,100/200));
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah;
15. Peraturan Walikota Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Tahun 2022 Nomor 54)

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2024:

- Menjabarkan Sasaran dan Program yang telah tertuang di dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2021-2026 dalam bentuk kegiatan Tahunan agar efektif dan terarahnya pelaksanaan program serta menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

- untuk memberikan arahan atau acuan serta pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan untuk tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan



#### **1.4 Sistematika Penyajian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Menjelaskan gambaran umum penyusunan rancangan Renja secara ringkas yang mencakup, antara lain :

- 1.1** Latar belakang, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kota Denpasar serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- 1.2** Landasan hukum, Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang (Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah
- 1.3** Maksud dan Tujuan ,Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah
- 1.4** Sistematika Penulisan yang menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja, serta susunan garis besar isi dokumen

##### **BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai Triwulan II**

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sampai Triwulan II mengacu pada APBD



### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**

Dalam bab ini menyajikan rumusan Rencana Program dan Kegiatan di Tahun 2023 beserta indikator kinerja dan pagu indikatif.

**BAB IV PENUTUP**, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sampai Triwulan II**

Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan gambaran tentang pencapaian serangkaian aktivitas, sebagai implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja berupa input, output, dan outcome pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada tingkat sasaran digunakan untuk menunjukkan secara lebih langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran dapat dilihat dengan lebih jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcome yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan atau minimal indikator output.

Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan II oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama tahun 2024. Adapun Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagaimana tersaji dalam table 2.1 sebagai berikut :



**Tabel 2.1**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024  
Kota Denpasar

No	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN SAMPAI TW II TAHUN 2024				
			TARGET RENJA SKPD TAHUN 2024		REALISASI KINERJA S/D TRIWULAN II TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>						
<b>I</b>	<b>Kegiatan</b> Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	5.836.390.289	32,06	1.871.251.965	32,06
<b>II</b>	<b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah						
2	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	3.471.899.664	30,89	1.072.550.135	30,89
3	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	112.913.968	25,16	28.403.814	25,16
4	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	52.115.150	0	0	0
5	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	78.928.000	15,79	12.460.692	15,79
<b>III</b>	<b>Kegiatan</b> Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
6	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan	26 Unit	517.115.336	24,73	127.893.925	24,73



7	<b>Sub Kegiatan</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pajaknya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 %	163.017.451	9,89	16.128.000	9,89
IV	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
8	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	150.750.000	40,13	60.500.000	40,13
9	<b>Sub Kegiatan</b> Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	362.100.000	15,74	57.003.772	15,74
10	<b>Sub Kegiatan</b> Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	22.350.000	4,50	1.005.000	4,50
11	<b>Sub Kegiatan</b> Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	95 %	398.921.000	0,56	2.250.000	0,56
12	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	41.150.000	12,21	5.025.000	12,21
V	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
13	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	95 %	2.982.895.000	4,36	130.090.930	4,36
VI	<b>Kegiatan</b> Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
14	<b>Sub Kegiatan</b> Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	54.000.000	0	0	0
15	<b>Sub Kegiatan</b>	Jumlah Aplikasi	2 Unit	106.000.000	0	0	0



	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah					
16	<b>Sub Kegiatan</b> Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Layanan	107.200.000	0,94	1.005.000	0,94
17	<b>Sub Kegiatan</b> Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	295.525.000	0	0%	0
<b>VII</b>	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	48.000.000	3,13	1.500.000	3,13
18	<b>Sub Kegiatan</b> Kordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	48.000.000	3,13	1.500.000	3,13
19	<b>Sub Kegiatan</b> Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	64.650.000	0	0%	0
<b>VIII</b>	<b>Kegiatan</b> Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	64.650.000	0	0%	0
20	<b>Sub Kegiatan</b> Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	36 Perangkat Daerah	128.900.000	5,26	6.775.000	5,26

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, terdapat beberapa evaluasi yang dapat disimpulkan meliputi:

**1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan Triwulan II Tahun anggaran 2024, Proses pengadaan barang dan jasa belum dapat dilaksanakan secara optimal dikarenakan terkendala dengan proses pengadaan yang menggunakan Aplikasi e-catalog serta pemenuhan TKDN.

**2. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan**

Dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun anggaran 2024, pencapaian realisasi Fisik sub kegiatan sebesar 33,03 % dan realisasi keuangan 33,06% dari target yang direncanakan sebesar 33,20 % .



### **3. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program /kegiatan**

Faktor – faktor penghambat pencapaian nilai akhir kinerja sasaran adalah

- Proses pengadaan harus mempertimbangkan penggunaan produksi dalam negeri (TKDN)
- Proses adaptasi menggunakan e- Catalog dalam memproses pesanan
- Belum optimalnya penerapan perencanaan dan anggaran

Faktor – faktor yang menjadi pendorong keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan adalah :

- Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang memahami teknologi
- Penerapan Adaptasi kebiasaan Baru dengan bantuan teknologi informasi
- Telah Optimalnya koordinasi antar bidang dalam pelaksanaan kegiatan

### **4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah**

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu berkembangnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk mempermudah masyarakat berpartisipasi didalam pembangunan khususnya di Kota Denpasar. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi akan dapat meningkatkan kualitas layanan publik secara efisien dan efektif sehingga Meningkatkan Pelayanan Publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) Guna Mewujudkan Denpasar sebagai Kota Cerdas (Smart city)

### **5. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut \**

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

- Merencanakan secara cermat proses perencanaan dan penganggaran agar dapat memenuhi Target yang telah ditetapkan.
- Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

### 1. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Internet telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perorangan, organisasi, perusahaan, dan instansi pemerintah. Di dalam bidang pemerintahan, internet digunakan pemerintah untuk membuat sistem informasi yang bermanfaat mempermudah tugas-tugas pemerintah. Perangkat-perangkatnya sebagai pendukung kelancaran proses informasi dan komunikasi misalkan saja jaringan. Kendala yang sering muncul akibat jaringan adalah Keadaan Cuaca yang bisa mengakibatkan perubahan sinyal/frekuensi jaringan wireless, Throughput (Kecepatan Akses) untuk mengatasi hal tersebut Dinas Kominfo mulai Tahun 2013 membangun Jaringan FO (Fiber Optik).

Sampai dengan Tahun 2024 Perangkat Daerah yang sudah terpasang Jaringan FO (Fiber Optik) adalah : 56 Titik Fiber Optik (56 OPD). Tahun 2024 Masih

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	Link Kominfo
1	Sekretaris Daerah Kota Denpasar	Terhubung
2	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Denpasar	Terhubung
3	Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar	Terhubung
4	Administrasi Umum Sekda Kota Denpasar	Terhubung
5	Inspektur Kota Denpasar	Terhubung
6	Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar	Terhubung
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar	Terhubung
8	Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar	Terhubung
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar	Terhubung
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar	Terhubung
11	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar	Terhubung
12	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar	Terhubung
13	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar	Terhubung
14	RSUD Wangaya Kota Denpasar	Terhubung
15	Sekretaris DPRD Kota Denpasar	Terhubung
16	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar	Terhubung
17	Dinas Kesehatan Kota Denpasar	Terhubung
18	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar	Terhubung
19	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar	Terhubung
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar	Terhubung
21	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	Terhubung
22	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	Terhubung
23	Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar	Terhubung
24	Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar	Terhubung
25	Dinas Pertanian Kota Denpasar	Terhubung
26	Dinas Perikanan dan Ketanahan Pangan Kota Denpasar	Terhubung
27	Dinas Kebudayaan Kota Denpasar	Terhubung



28	Dinas Pariwisata Kota Denpasar	Terhubung
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar	Terhubung
30	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar	Terhubung
31	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	Terhubung
32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar	Terhubung
33	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar	Terhubung
34	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar	Terhubung
35	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar	Terhubung
36	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Denpasar	Terhubung
37	Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Kota Denpasar	Terhubung
38	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setda Kota Denpasar	Terhubung
39	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Denpasar	Terhubung
40	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Denpasar	Terhubung
41	Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Denpasar	Terhubung
42	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Denpasar	Terhubung
43	Bagian Organisasi Setda Kota Denpasar	Terhubung
44	Bagian Umum Setda Kota Denpasar	Terhubung
45	Bagian Kerjasama Setda Kota Denpasar	Terhubung
46	Camat Denpasar Selatan	Terhubung
47	Camat Denpasar Timur	Terhubung
48	Camat Denpasar Utara	Terhubung
49	Camat Denpasar Barat	Terhubung
50	Pusdalops BPBD Renon	Terhubung
51	Pelayanan E-ktip Kecamatan Denpasar Timur	Terhubung
52	Dharmanegara Alaya	Terhubung
53	UPTD Metrologi Legal	Terhubung
54	Layanan Desain (Rumah Kemasan)	Terhubung
55	Lurah Peguyangan	Terhubung
56	Lurah Tonja	Terhubung



## DAFTAR PUBLIK WIFI BALI SMART ISLAND DI KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2024

### I. PENYELENGGARAAN FREE WIFI BALI SMART ISLAND I DESA ADAT

NO	LOKASI PENEMPATAN WIFI	ALAMAT	JUMLAH TITIK WIFI	KONDISI PERANGKAT	KECEPATAN INTERNET
1	Desa Pakraman Penatih	Jl. Trenggana Penatih	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
2	Desa Pakraman Kesiman	Jl. Wr. Supratman Kesiman Petilan	1	Berfungsi dan Baik	Down 20 Mbps Up 20 Mbps
3	Desa Pakraman Anggabaya	Jl. Trenggana Penatih	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
4	Desa Pakraman Tanjung Bungkak	Jl. Pandu	1	Berfungsi dan Baik	Down 15 Mbps Up 20 Mbps
5	Desa Pakraman Tambawu	Jl. Trengguli 15, Penatih	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
6	Desa Pakraman Yangbatu	Jl. Letda Kajeng No.35	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
7	Desa Pakraman Sumerta	Jl. Nusa Indah No.2,	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
8	Desa Pakraman Penatih Puri	Jl. Padma	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
9	Desa Pakraman Poh Manis	Jl. Nagasari (Pengkolan Pura Desa)	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
10	Desa Pakraman Laplap	Jl. Siulan No. 206 A	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
11	Desa Pakraman Bekul	Jl. Selatan banjar bekulNo. 144	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
12	Desa Pakraman Pagan	Jl. Rijasa	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps



13	Desa Pakraman Cengkilung	Jl. Sekargadung	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
14	Desa Pakraman Peguyangan	Jl. Ahmad Yani	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
15	Desa Pakraman Pohgading	Jl. Kertanegara	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
16	Desa Pakraman Peraupan	Jl. Antasura 108	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
17	Desa Pakraman Tonja	Jl. Banjar Oongan	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
18	Desa Pakraman Ubung	Jl. Cokroaminoto No.239	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
19	Desa Pakraman Kedua	Jl. Cekomaria	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
20	Desa Pakraman Peninjoan	Jl. Padma No 25	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
21	Desa Pakraman Jenah	Jl. Cekomar denpasar	1	Berfungsi dan Baik	Down 16 Mbps Up 20 Mbps
22	Desa Pakraman Oongan	Jl. Noja	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
23	Desa Pakraman Padangsambian	Jl. Gunung tangkuban Perahu II	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
24	Desa Pakraman Denpasar	Jl. Nusa Kambangan No. 60	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
25	Desa Pakraman Sesetan	Jl. Raya Sesetan No.149	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
26	Desa Pakraman Panjer	Jl. Tukad Mawa	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
27	Desa Pakraman Renon	Jl. Tukad Oos, Renon	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps



28	Desa Pakraman Pedungan	Jl. Pulau Singkep	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
29	Desa Pakraman Intaran	Jl. Intaran, Sanur Kauh,	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
30	Desa Pakraman Pemogan	Jl. Pulau Bungin 123-129,	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
31	Desa Pakraman Kapaon	Jl. Kapaon, Pemogan	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
32	Desa Pakraman Sidakarya	Jl. Dewata Sidakarya	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
33	Desa Pakraman Penyaringan	Jl. Penyaringan No.21,	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
34	Desa Pakraman Serangan	Jl. Banjar Peken, Serangan	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
35	Desa Pakraman Sanur	Jl. Sanur Beach Street Walk	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps

## II. PENYELENGGARAAN FREE WIFI BALI SMART ISLAND DI PUSKESMAS

NO	LOKASI PENEMPATAN WIFI	ALAMAT		KONDISI PERANGKAT	KECEPATAN INTERNET
1	Puskesmas I Dentim	Jl. Pucuk No. 1	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
2	Puskesmas II Dentim	Jl. Nagasari No. 25 A	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
3	Puskesmas I Densel	Jl. Gurita No.8, Ssetan,	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
4	Puskesmas II Densel	Jl. Danau Buyan 3 Sanur	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
5	Puskesmas III Densel	Jl. Glogor Carik No. 17	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
6	Puskesmas IV Densel	Jl. Pulo Moyo No. 63 A	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps



7	Puskesmas I Denut	Jl. Angsoka No. 17	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
8	Puskesmas II Denut	Jl. Gunung Agung, Gang II, No 8 X	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
9	Puskesmas III Denut	Jl. Ahmad Yani, Dauh Puri Kaja	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
10	Puskesmas I Denbar	Jl. Gn Rinjani No. 65	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
11	Puskesmas II Denbar	Jl. Gn Sopotan Gg Puskesmas No. 3	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
12	Pustu Pemecutan	Jl. Imam Bonjol No.61, Pemecutan Klod	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
13	Pustu Ubung Kaja	Jl. Kertanegara Br. Poh Gading	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
14	Pustu Peguyangan	Jl. Kertanegara No.1 Pulo Gambang	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
15	Pustu Peguyangan Kangin	Jl. Padma Br. Kayangan	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
16	Pustu Dangin Puri Kelod	Jl. Cok Agung Tresna 1 Denpasar	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
17	Pustu Sumerta Kelod	Jl. Laksama Denpasar	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
18	Pustu Kesiman	Jl. Sedap Malam I/1 Denpasar	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
19	Pustu Panjer	Jl. Tukad Pakerisan 63 Denpasar	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
20	Pustu Sidekarya	Jl. Kertawinangun 3 Denpasar	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
21	Pustu Serangan	Br. Kampung Bugis	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps



### III. PENYELENGGARAAN FREE WIFI BALI SMART ISLAND DI AREA PUBLIK / FASILITAS UMUM

NO	LOKASI PENEMPATAN WIFI	ALAMAT		KONDISI PERANGKAT	KECEPATAN INTERNET
1	Taman Rekreasi Tukad Bindu	Sumerta Kelod, Denpasar	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
2	Tukad Badung / Pasar Badung	Jl. Gajah Mada Denpasar	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
3	Taman Janggan	Jl. Raya Puputan No.142	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
4	Lapangan Puputan (Bale Bengong)	Jl. Beliton	1	Berfungsi dan Baik	Down 17 Mbps Up 20 Mbps
5	Museum Bali	Jl. Mayor Wisnu No.1, Dangin Puri	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
6	Pasar Sindu Sanur	Jl. Belanjong No.1, Sanur	1	Berfungsi dan Baik	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
7	Youth Park Lumintang	Jl. Majapahit	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
8	Taman Kota Lumintang (Pura Lokanatha)	Jl. Majapahit	1	Berfungsi dan Baik	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
9	Pura Sakenan	Jl. Pulau Serangan, Sesetan	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
10	Pura Desa/ Puseh Pakraman Denpasar	Jl. Gajah Mada No. 22	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
11	Pura Candi Narmada	Jl. Tanah Kilap, Pemogan	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
12	Pura Jagatnatha	Jl.Surapati, Dangin Puri	2	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 18 Mbps Up 20 Mbps
13	Taman Lumintag Selatan (Skate Park)	Jl. Mataram, Dauh Puri Kaja	2	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
14	Pasar Adat Ubung (Coskroaminoto)	Jl. Cokroaminoto, Ubung	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
15	Pasar Kereneng	Jl. Kamboja No.24	1	Titik Baru dan Belum	Down 18 Mbps Up 20

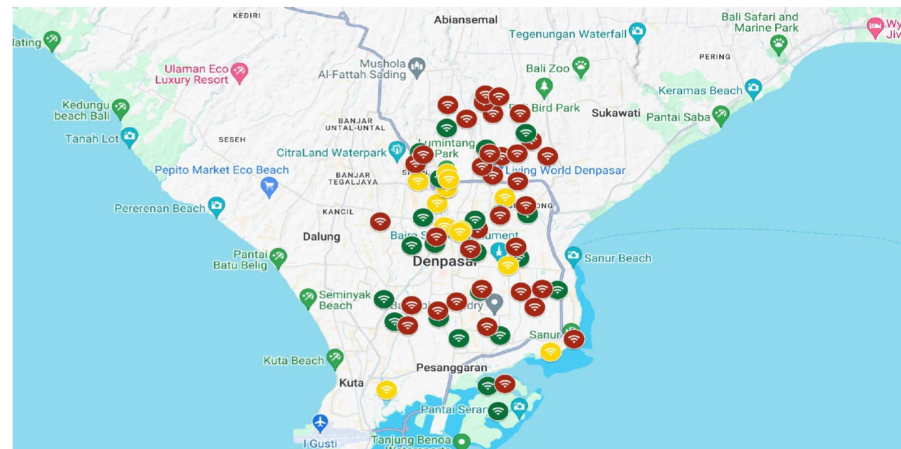


				Terpasang	Mbps
16	Pasar Pidada (Ubung)	Jl. Pidada Ubung	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps
17	Pasar Pasar Tiara Grosir	Gg. III No.15, Pemecutan Kaja	1	Titik Baru dan Belum Terpasang	Down 19 Mbps Up 20 Mbps

## Wifi Bali Smart Island di Kota Denpasar

75 Titik Bali Smart Island pada Desa Pakraman, Puskesmas dan Objek Wisata / Fasilitas Umum

75 Titik Akses Wifi Bali Smart Island di Kota Denpasar



Keterangan:

- Desa Adat Pakraman
- Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
- Objek Wisata dan Fasilitas Umum



## 2. Aplikasi Pemerintah yang Terintegrasi

Pemanfaatan teknologi informasi Pemerintahan Kota Denpasar pada tahun 2013 ke bawah menempati posisi 3 (tiga) dalam Penggunaan Sistem Informasi Transaksional secara Sektoral. Artinya setiap OPD sebenarnya sudah ada aplikasi sesuai dengan kebutuhan teknis masing-masing dan masih bersifat parsial sehingga harus di Integrasikan melalui satu metode yang sesuai tanpa harus membangun semuanya dari awal. Tetapi setelah adanya kajian di tahun 2014 tentang Kajian Data Center untuk Sistem Pengolahan Data Terpadu Menuju E-Government, Pemerintah Kota Denpasar mulai membangun secara bertahap Data Center (Pusat Data) Denpasar, yang merupakan pusat dari semua data dan integrasi sistem masing-masing OPD, sehingga menempatkan Kota Denpasar ke posisi 4 (empat) yaitu Pemanfaatan Sistem Terintegrasi dalam arti tingkatan Kota Cerdas.

Data Center sebagai media pertukaran data dan informasi tanpa harus mengganti sistem yang sudah ada. Dalam hal ini disebut Sistem Informasi Lintas Sektoral atau Multi Sektoral. Sehingga Pengembangan dan Pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk menghubungkan, memonitor dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota akan lebih efektif, efisien dan maksimal untuk memberikan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan bisa terwujud.

Data Center Kota Denpasar saat ini sudah banyak terintegrasi dengan sistem-sistem yang ada di OPD, seperti : E-KTP Capil, Data Rujukan Online, Rumah Tangga Miskin, Bursa Kerja, Data Dapodik, Dispenda, Kepegawaian dan Disperindag, dan pada tahun 2019 telah dilakukan integrasi dengan beberapa sistem informasi diantaranya : SIMPEG, e-RLTH, Portal DLHK, Aplikasi Kota Tangguh, serta Simponi Kota Denpasar, saat ini pada tahun 2024 akan kembali dilakukan integrasi dengan beberapa sistem di OPD Kota Denpasar tetapi berfokus kepada pengembangan Aplikasi Mobile Denpasar dalam Satu Genggaman yang berfokus kepada integrasi layanan-layanan yang menggunakan sistem informasi untuk masyarakat Kota Denpasar menjadi satu aplikasi portal atau satu genggaman Kota Denpasar.



**Realisasi Integrasi Sistem Informasi Layanan Publik ke dalam satu aplikasi Portal  
Denpasar dalam Satu Genggaman**

Target 2024	Realisasi 2024 (April)
100% (1 Kali Pengembangan Aplikasi)	-

Aplikasi- Aplikasi yang akan di terintegrasi Tahun 2024 adalah :

1. Pengembangan WBS (Whistle Blowing System)  
Tahun 2024 target Pengembangan Sistem Informasi / Aplikasi yaitu:
2. Pengembangan WBS (Whistle Blowing System)
3. Rasio issu news / centimen berita tentang Pemerintah Kota Denpasar di Media On  
Line



### ***Mobil Informasi Keliling***



Menginformasikan peraturan-peraturan Pemkot Denpasar  
Contoh :

Untuk tidak membuang atau menaruh sampah sembarangan, menghimbau masyarakat untuk tertib administrasi kependudukan serta memberikan informasi perijinan yang berlaku di Pemkot Denpasar.

### ***Mobil Sound Keliling***



Untuk membantu kegiatan pemerintah kota Denpasar, diskominfo menyediakan fasilitas peralatan sound system yang siap setiap saat apabila diperlukan dengan mobil sound system.

### **Mobil Relay (OB VAN)**



Mobil Relay (OB VAN) Adalah Fasilitas “Layanan bergerak” yang Digunakan untuk Siaran Langsung / Reportase



### **Capaian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**

Berdasarkan capaian Renja Perubahan Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 ini disusun, Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar memiliki Indikator Kinerja yang dipakai sebagai acuan kerja, sekaligus sebagai tolak ukur pencapaian target dalam hal pelaksanaan urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Adapun Sasaran Kinerja Dinas Komunikasi, Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai berikut :



**Tabel 2.3**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2020	Target						Kondisi Akhir Tahun 2026	Formulasi
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya kematangan kebijakan SPBE	Nilai Indeks kebijakan SPBE	-	3,00	3,20	3,40	3.60	3,80	4.00	4.00	Nilai pembobotan domain 1 : Kebijakan Internal SPBE
2	Meningkatnya kematangan tata Kelola SPBE	Nilai Indeks tata Kelola SPBE	-	3,30	3,45	3.60	3.75	3,90	4.05	4.05	Nilai pembobotan domain 2 : Tata Kelola SPBE
3	Meningkatnya kematangan manajemen SPBE	Nilai Indeks manajemen SPBE	-	2,18	2,40	2.60	2.80	3.00	3.20	3.20	Nilai pembobotan domain 3 : Manajemen SPBE
4	Meningkatnya kematangan layanan SPBE	Nilai Indeks layanan SPBE	-	3,55	3,65	3.75	3.85	3,95	4.05	4.05	Nilai pembobotan domain 4 : Layanan SPBE



### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah

1. Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah
2. Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah
3. Privasi data dan informasi
4. Keterbukaan Informasi publik
5. Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan

#### 2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi

Beberapa Permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian di Kota Denpasar :

1. Belum Optimalnya Transformasi Digital dalam mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas
3. Masih lemahnya sistem keamanan data dan informasi ;



2.3.2 Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional

Apabila isu-isu strategis yang ada melalui strategi-strategi dan arah kebijakan yang dipersiapkan mampu dipenuhi dan berjalan dengan baik dalam mengatasi segala hambatan dan permasalahan yang ada, maka capaian visi dan misi kepala daerah, dan capaian program nasional tentunya akan tercapai dengan baik, oleh karenanya dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang berkompeten untuk mensukseskannya.

2.3.3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Tantangan yang dihadapi Diskominfo

- 1) Kesenambungan pembangunan e-government akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.
- 2) Kurangnya pemahaman publik tentang tata cara memanfaatkan layanan e-government.
- 3) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.
- 4) Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.

Peluang yang dimanfaatkan Diskominfo

- 1) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.
- 2) Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- 3) Peningkatan pelaksanaan e-government.

Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat



### BAB III

#### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah Serangkaian tujuan dan proses yang bisa membantu perangkat daerah mencapai tujuan tersebut. Dengan adanya rencana perangkat daerah, dalam hal ini pimpinan akan memahami skala prioritas dengan lebih baik. Rencana kerja juga dapat membantu aparatur dalam perangkat daerah melaksanakan kegiatan dengan baik dan teratur, disamping itu rencana kerja yang tersusun dengan baik, akan menghasilkan pembagian tugas yang baik pula.

Dalam Pelaksanaanya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 tetap mengacu pada Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan tetapi Program dan Kegiatannya mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimana dalam Peraturan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut terjadi Perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut :

#### SEMULA

-	Program	Kegiatan
---	---------	----------

#### MENJADI

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Menerjemahkan sub urusan	Menerjemahkan Kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota	Menerjemahkan aktivitas/layanan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tahun 2024 sebagai berikut:



## Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi, sarana dan prasarana terhadap keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan sehingga tercapainya efektifitas dan efisien

- a. **Kegiatan** : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. **Kegiatan** : Administrasi Umum Perangkat Daerah  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  
**Sub Kegiatan** : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- c. **Kegiatan** : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
**Sub Kegiatan** : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

### 2. Program Pengelolaan INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Program ini bertujuan untuk Desiminasi Informasi kepada masyarakat

- a. **Kegiatan** : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
**Sub Kegiatan** : Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  
: Pengelolaan Media Komunikasi Publik  
: Layanan Hubungan Media  
: Penguat Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  
: Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas



### 3. Program PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Program ini bertujuan Memanfaatkan Penggunaan Teknologi Informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya.

- a. **Kegiatan** : Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan** : Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
- b. **Kegiatan** : Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - Sub Kegiatan** : Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintah Berbasis Elektronik
  - : Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
  - : Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan pemerintah
  - : Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

#### Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

### 4. Program PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- a. **Kegiatan** : Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
  - Sub Kegiatan** : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
  - : Memabangun Metadata Statistik Sektoral

#### Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

### 5. Program PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- a. **Kegiatan** : Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota



**Sub Kegiatan** : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, Adapun Rencana Kerja Perubahan yang akan dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informasi dan Informatika Tahun 2024 yang akan diusulkan di Sub Kegiatan lebih lanjut dijabarkan dalam Tabel 3.1



**Tabel 3.1**  
**Perubahan Rencana Program / Kegiatan dan Pendanaan**  
**Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar**  
**Tahun 2023**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja		APBD Induk 2024	Pagu Usulan Perubahan	Bertambah/ Berkurang
			Induk 2024	Perubahan 2024			
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>						
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>						
<b>I</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						
1	-Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 Orang	25 Orang	5.836.390.289	5.836.800.908	410.619
<b>II</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						-



Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Statistik Kota Denpasar Tahun 2024

2	-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	19 Paket	3.471.899.664	3.575.719.664	103.820.000
3	-Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	112.913.968	231.713.968	118.800.000
4	-Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	52.115.150	48.128.150	(3.987.000)
5	-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	78.928.000	112.614.000	33.686.000
<b>III</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan</b>						-
6	-Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	26 Unit	26 Unit	517.115.336	517.515.336	400.000
7	- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	100%	163.017.451	163.017.451	-



<b>IV</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						-
8	- Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	150.750.000	150.750.000	-
9	-Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	1 Dokumen	362.100.000	368.080.000	5.980.000
10	-Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	1 Layanan	1 Layanan	22.350.000	22.350.000	-
11	-Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Persentase Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	95%	95%	398.921.000	398.921.000	-
12	-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi	1 Dokumen	1 Dokumen	41.150.000	41.150.000	-



		an Informasi Program atau Kebijakan					
<b>V</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						-
13	-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Realisasi Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	95%	95%	2.982.895.000	2.982.895.000	-
<b>VI</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						-
14	-Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	54.000.000	233.512.000	179.512.000
15	-Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	2 Unit	2 Unit	106.000.000	106.000.000	-



Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Statistik Kota Denpasar Tahun 2024

16	-Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	1 Layanan	107.200.000	107.200.000	-
17	-Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	1 Dokumen	295.525.000	295.525.000	-
<b>VII</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>						-
18	-Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	48.000.000	51.350.000	3.350.000
19	-Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	1 Dokumen	64.650.000	64.625.000	(25.000)



<b>VIII</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>						-
20	-Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	128.900.000	130.400.000	1.500.000
					<b>14.994.820.858</b>	<b>15.438.267.477</b>	<b>443.446.619</b>



## BAB IV P E N U T U P

Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar 2023 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan selama perubahan tahun 2023 di lingkup Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2024 mengacu kepada Renja Tahun 2024, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan triwulan I tahun anggaran 2024.

Dalam Anggaran Induk Tahun 2024 Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar melaksanakan 5 (Lima) program , 8 (Kegiatan) kegiatan dan 20 (Dua Puluh ) Sub Kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 14.994.820.858,- dan di dalam anggaran perubahan diusulkan menjadi Rp.15.438.267.477 terjadi penambahan sebesar 443.446.619, dengan pelaksanaan melaksanakan 5 (Lima) program , 8 (Kegiatan) kegiatan dan 20 (Dua Puluh) Sub Kegiatan. Penambahan Anggaran dimaksud agar tercapainya Sasaran dan Target yang telah ditetapkan .

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan penunjang yang diemban oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kota Denpasar. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Denpasar, 8 Mei 2024

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Kota Denpasar

Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP, MSi

Pembina TK. I

NIP. 197801281996121003

